

## KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI MELALUI PERSPEKTIF GENDER

Rizki Pratama<sup>1</sup>, Nurliah Nurdin<sup>2</sup> & Meltarini<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia  
Correspondence Author: rizkipratama.rp81@gmail.com

### *ABSTRACT*

*This research aims to determine the phenomenon of gender stereotypes that often occurs, especially in work. Gender stereotypes are general views or prejudices regarding the attributes or characteristics, or roles that women and men should have or carry out. Gender stereotypes regarding women's roles then limit their abilities and even career choices, including in politics. This stereotype is closely related to the position where women and men have their respective places in social life. In the political context, the role and position of women is quite clearly discriminated against. This stereotype has been built up in the minds of society for a long time, which has led to low levels of women's electability even though it has been accommodated through affirmative regulations. This research uses qualitative research methods. Researchers apply in-depth interview techniques, where researchers will interview informants or subjects in depth. The interactive model analysis technique is reducing, presenting data and concluding data which is carried out interactively with a cyclical data collection process. Conclusions are drawn by observing the narrative text resulting from the data presentation. Drawing conclusions aims to describe the answer to the research problem formulation. The results of the research show that the representation of women as legislative candidates will ultimately return to how the democratic system shapes perceptions of women's position in politics as seen from the data. Data on elected legislative candidates in 2019 in Jambi City shows that there are only eight female legislative members out of a total of 45 legislative candidates. selected. Cadre formation is an important part of the role and function of political parties. It is not surprising that two (2) of the total eight (8) female legislative candidates elected are party cadres contesting with serial number 1. The priority of cadre numbering is important in this case considering that people's assumptions about numbers are still very strong. This also applies to other legislative candidates from competing parties. If we examine further, the majority of elected candidates with the largest number of voters and vote contributions from parties are legislative candidates with serial numbers from small to large. The reasons for the low electability of women in the 2019 legislative elections in Jambi City based on the indicators above include the still dominant stigma of men in Indonesian society as breadwinners and obliged to work. Politics, which in this case is considered work, makes it an open struggle between men and women regardless of their motivation. This is called a patriarchal culture which places men in the work domain.*

***Keyword: Gender stereotypes, Women, 2019 Election***

### **PENDAHULUAN**

Fenomena stereotaip gender marak terjadi terutama di pekerjaan, termasuk di politik. Organisasi Hak Asasi Manusia PBB atau *United Nations Human Right Council* (UNHCR) mendefinisikan stereotaip gender sebagai pandangan umum atau prasangka mengenai atribut atau karakteristik, atau peran yang harus dimiliki atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Stereotip gender terhadap peran perempuan yang kemudian membatasi kemampuan dan bahkan pilihan karir mereka, termasuk dalam

politik.

Politik dianggap sebagai wilayah maskulin dan pada akhirnya stereotip gender tersebut membentuk pilihan pemilih dalam pemilu. Politisi perempuan dan laki-laki dipandang berbeda terhadap cara memandang masalah, menyelesaikan masalah dan mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu. Pandangan stereotip ini terjadi tidak selalu pada negara dengan pembatasan terhadap perempuan di ruang publik seperti negara arab, atau negara dengan indeks demokrasi tinggi. Data dari *Economist Intelligence Unit* (EIU) tahun 2022 menunjukkan bahwa Norwegia merupakan negara paling demokratis, berturut-turut sejak tahun 2021.

Indonesia sendiri, saat ini berada pada jumlah yang terbilang rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan Indonesia dalam parlemen hanya 18,2%. Hal ini masih jauh dari cita-cita kebijakan afirmasi yang diberlakukan di Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia memberikan ruang kepada perempuan agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpolitik, menduduki jabatan-jabatan politik yang strategis dan berperan dalam mengambil kebijakan secara demokratis. Perempuan memiliki hak untuk bergabung dikancah politik melalui berbagai macam kebijakan (Nurliah Nurdin and Astika Ummy Athahira: 2022), salah satu diantaranya adalah penetapan kuota 30% dalam pemilihan umum (Pemilu) yang ditujukan untuk menghindari dominasi laki-laki di lembaga-lembaga politik dalam merumuskan kebijakan publik (Jusri Adi, Fitriani Sari Handayani Razak, and Hendri Kurniawan: 2022).

Afirmasi lebih dipertegas lagi dengan adanya penerapan *zipper system* (Pasal 55), dimana setiap tiga bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon dengan nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Belakangan, ketegasan itu diperkuat dengan adanya PKPU yang menyajikan mekanisme diskualifikasi menjadi peserta pemilu yang mampu memaksa partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif. Kebijakan ini sebagai syarat partai untuk berkompetisi pada pemilihan legislatif. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi Pemerintah terhadap hak-hak perempuan dalam politik yang selama ini diyakini terabaikan oleh sistem. Padahal, perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan slogan oleh partai politik untuk mendongkrak elektabilitas partai.

Kebijakan ini telah menghasilkan peningkatan keterwakilan perempuan di pada pencalonan, terutama di di legislatif. Namun demikian, studi (Jusri Adi, Fitriani Sari Handayani Razak, and Hendri Kurniawan: 2022) menemukan bahwa penerapan kuota 30% tetap tidak membuat representasi perempuan di parlemen menembus representasi 30% padahal ambang batas parlemen mengalami kenaikan menjadi 4% dan partai politik juga mengikuti aturan kuota dan sistem zipper. Studi lain menunjukkan bahwa representasi citra politisi perempuan di Parlemen masih kurang adanya kepercayaan dari masyarakat yang disebabkan adanya ketimpangan gender (Nurdin, N., & Athahira, A. U: 2022), kurangnya akses, dianggap kurang konsisten, kurang pengalaman dan minim strategi (Endang Tri Santi: 2020).

Partisipasi politik perempuan tidak cukup jika hanya dilihat dari keikutsertaan kaum perempuan dalam memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum. Lebih dari itu, partisipasi politik perempuan dapat dilihat dari keikutsertaan perempuan dalam segala bentuk kegiatan politik seperti, mempengaruhi kebijakan pemerintah, bergabung dengan partai politik, atau ikut dalam

kegiatan memilih dan dipilih dalam pemilu guna mendapatkan kekuasaan politik.

Tatanan kehidupan masyarakat yang didominasi oleh laki-laki dari pada perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang (Ukhti Raqim: 2016), pada tatanan ini perempuan ditempatkan sebagai manusia kelas kedua yang berada di bawah prioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial didalam masyarakat. Hal ini dianggap sebagai stereotip gender. Stereotip ini telah terbangun sejak lama dalam benak masyarakat, yang menyebabkan rendahnya keterpilihan perempuan meskipun telah diakomodir melalui regulasi afirmasi. Saat ini, KPUD Kota Jambi telah merilis calon legislatif yang akan bertanding dalam pemilu serentak 2024 yang akan datang. Sekali lagi, perempuan masuk dalam 30% afirmasi tersebut. Namun demikian, tentunya keterwakilan tersebut tidak hanya sebagai syarat agar partai politik dapat mendaftar, namun juga sebagai upaya untuk memberikan akses yang seimbang bagi perempuan untuk mewakili dirinya.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bahasan sebelumnya di atas, maka masalah- masalah yang terdapat pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Adanya gender stereotip terhadap pencalonan legislatif perempuan menyebabkan rendahnya keterpilihan perempuan di legislatif Kota Jambi; 2) Adanya gender stereotip masyarakat Kota Jambi terhadap kemampuan perempuan dalam berkarir di politik; 3) Adanya kesulitan partai politik di Kota Jambi dalam mendapatkan *figure* calon legislatif perempuan; 4) Kurangnya kaderisasi anggota partai politik perempuan di Kota Jambi; 5) Calon legislatif perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2019 telah terpenuhi dan 6) Keterwakilan Perempuan di Legislatif Kota Jambi tekesan hanya untuk memenuhi syarat 30%.

Pitkin dalam (Nuri Soeseno: 2014) mengidentifikasi ada empat pandangan yang berbeda mengenai representasi. Keempat pandangan tersebut yaitu formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Dua pandangan pertama (formalistis dan deskriptif) menjelaskan representasi sebagai atau '*way of acting*' atau '*acting for*', sedangkan dua pandangan terakhir (simbolis dan substantif) menjelaskan representasi sebagai '*way of being*' atau '*standing for*' untuk memahami makna konsep tersebut maka perlu diketahui konteks tertentu dalam mana konsep tersebut diletakan.

Penelitian ini menggunakan teori Hana F Pitkin tentang keterwakilan yaitu keterwakilan dibedakan dalam empat kategori yaitu: keterwakilan substantif keterwakilan formal, keterwakilan deskriptif dan keterwakilan simbolik Keterwakilan formal dapat dipahami sebagai perwakilan politik yang berada di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Keterwakilan substantif yaitu model keterwakilan yang menggambarkan seorang wakil bertindak untuk mereka yang diwakili. Sedangkan keterwakilan deskriptif yaitu bentuk keterwakilan yang menggambarkan seorang wakil berdiri untuk orang-orang yang secara objektif serupa. keterwakilan simbolik yaitu Jika wakil berdiri untuk mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan.

Representasi formal dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara lewat mana seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya, dan jabatannya. Yang dimaksudkan akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum seseorang wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsif terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.

Representasi simbolis adalah cara-cara seorang wakil '*stand for*' (membela) konstituen atau para pemilihnya. Simbol dapat merepresentasikan sesuatu atau menghadirkan dengan merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, misalnya sebuah bendera merepresentasikan sebuah bangsa atau jilbab merepresentasikan kelompok agama islam. Dalam bentuk representasi ini tidak diperlukan kesamaan atau kemiripan diantara yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan. Manusia juga bisa dilihat sebagai simbol yang merepresentasikan, misalnya seseorang dapat pula merepresentasikan sebuah bangsa dalam sebuah situasi tertentu, misalnya seorang raja yang secara konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.

Representasi yang deskriptif merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan diantara wakil dan pemilihnya (atau di antara yang memilih dan yang dipilih). Dalam bentuk representasi ini maka wakil tidak bertindak untuk (*act for*) orang lain, tetapi ia mengatasnamakan (*stand for*). Dengan bentuk representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan layaknya seperti melihat cermin atau seperti dalam seni. Contoh yang sering dipergunakan adalah representasi bagi kelompok perempuan atau kelompok minoritas. Representasi yang sebenarnya menurut sejumlah penulis masyarakat bahwa wakil-wakil yang menjadi anggota parlemen haruslah mencerminkan secara tepat komposisi seluruh bangsa.

Representasi substantif. Disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil mempresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya. Dalam representasi ini maka tidak diperhitungkan isu pengelompokan berdasarkan geografis (distrik) atau bentuk pengelompokan lainnya yang bisa digunakan dalam representasi formalistis. Contoh yang dapat digunakan untuk bentuk representasi ini misalnya mewakili satwa langka yang hampir punah. Keempat macam representasi yang dikemukakan oleh Pitkin ini merupakan bentuk representasi yang muncul terkait dengan gagasan aktivitas, misalnya membuat representasi yang deskriptif atau menciptakan sebuah simbol.

Konsep gender lahir merekonstruksi hubungan antara laki-laki dan perempuan secara universal untuk membuka peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender. Gender merupakan suatu konsep kultural untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Ninla Elmawati Falabiba: 2019). Konsep gender pertama kali dikembangkan oleh ahli antropologi Amerika yaitu Margaret Mead, sebagaimana yang dikutip oleh Koentjaraningrat pada tahun 1932 Mead melakukan penelitian pada masyarakat primitif di Papua Nugini. Masyarakat tersebut terdiri dari masyarakat Arapesh, masyarakat Tchambuli, dan masyarakat Mundugumor. Meskipun pada saat itu kata "gender" belum digunakan dalam penelitiannya tetapi para pakar sosial dan seksilogi mengakui bahwa penelitian tersebut berkaitan dengan hubungan gender (Eka Perwitasari Fauzi: 2021).

Mead menyebutkan bahwa pada masyarakat Arapesh tidak ada perbedaan psikologi laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki sifat yang lemah lembut dan cenderung pasif. Pada masyarakat Tchambuli, memang ditemukan adanya perbedaan psikologi antara laki-laki dan perempuan seperti pekerjaan-pekerjaan yang cenderung berat dilakukan oleh perempuan, sedangkan kaum laki-lakinya berfokus pada bidang seni, ritual keagamaan, dan suka bersolek diri karena pada masyarakat ini biasanya

perempuan lah yang pertama kali menyukai kaum laki-lakinya maka dari itu kaum laki-laki berlomba-lomba untuk mempercantik diri agar disukai oleh kaum perempuan yang umumnya memiliki akses sumber daya. Berbeda dengan masyarakat Arapesh, pada masyarakat Mundugumor ini masyarakatnya memiliki sifat yang kasar, keras, aktif, dan cenderung agresif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendalami fenomena tertentu mengenai hal yang terjadi pada subjek yang diteliti contohnya tanggapan, tingkah laku, perbuatan, motivasi yang dikemukakan melalui kata-kata dan lainnya (Sugiyono: 2018). Penelitian kualitatif dapat memahami secara mendalam fenomena, pengalaman, atau situasi tertentu dari sudut pandang individu atau kelompok yang terlibat. Penelitian jenis kualitatif digunakan untuk menggali makna, motif, dan pola interaksi sosial yang seringkali tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif dengan angka. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengeksplorasi kompleksitas konteks sosial dan budaya, menggambarkan dinamika hubungan, serta menangkap nuansa yang muncul dari data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif juga memungkinkan pengembangan teori atau konsep baru berdasarkan temuan empiris.

Pada penelitian ini, angka perolehan suara caleg perempuan menunjukkan makna yang harus diungkapkan terkait mengapa keterpilihan caleg perempuan belum mencapai kuota afirmasi. Makna dari angka tersebut dapat diketahui dengan eksplorasi melalui penelitian kualitatif. Oleh karena itu, metode kualitatif jelas relevan untuk digunakan peneliti, karena penulis berusaha untuk mengetahui bagaimana pencalonan anggota legislatif perempuan dalam pemilihan umum di Kota Jambi khususnya di partai DEMOKRAT dan PAN.

Melalui metode deskriptif, peneliti bisa memberikan gambaran objek yang diteliti dan menyorotinya secara khusus, sehingga bisa menjelaskan dengan detail pengetahuan dalam waktu tertentu dan menjadi penelitian yang berharga bagi pengembangan konsep-konsep teoritis. Menurut pendapat Lexy Moleong dalam buku *Qualitative Research Methodology* (Lexy J. Moleong: 2017) mengatakan:

*“Penelitian kualitatif ialah penelitian dimana data yang dihimoun berbentuk kata, gambar, dan bukanlah angka. Hal ini dikarenakan implementasi metode penelitian kuantitatif. sehingga laporan penelitian akan berupa kutipan data untuk menggambarkan secara umum tentang penyajian laporan. Data bersangkutan data bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi yang lain.”*

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat karakteristik atau fenomena tertentu yang sedang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang "apa adanya" tanpa mengintervensi atau memanipulasi variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif sering digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan dalam data, serta untuk menjelaskan situasi yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Metode ini biasanya melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen, dengan hasil berupa deskripsi rinci yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih

lanjut atau pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis deskriptif untuk secara runtut menjelaskan fenomena dibalik tidak tercapainya keterwakilan 30% perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Jambi.

## PEMBAHASAN

Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam proses politik, dalam hal ini sebagai peserta dalam pemilihan umum legislatif. Konsep keterwakilan perempuan menggema dan diakomodir dalam kebijakan kuota 30% untuk calon legislatif perempuan sejak tahun 2003 sebagai bagian dari upaya meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Kebijakan ini pada akhirnya mendorong partai politik untuk mencalonkan setidaknya tiga dari Sembilan calon yang diusulkan. Implementasi keterwakilan secara normatif sebagai pemenuhan Undang-Undang terlaksana. Setiap partai politik mengusung kader perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang.

Keterwakilan, disisi lain, berbeda dengan keterpilihan. UU Keterwakilan bukan hanya soal menjamin tercapainya hak perempuan berpartisipasi dalam ruang politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya. Sehingga, keterpilihan perempuan dalam parlemen harus juga menjadi konsen dalam implementasi dan dampak kebijakan.

Penelitian ini menemukan fenomena menarik terkait implementasi keterwakilan dan keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kota Jambi tahun 2019. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa aktor kunci untuk menguraikan fenomena keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kota Jambi tahun 2019 dengan pendekatan analisis gender stereotip.

### **Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif di Kota Jambi Tahun 2019**

Kota Jambi memiliki jumlah penduduk 598.103 jiwa pada tahun 2018, dengan laki-laki sebanyak 300.566 jiwa dan perempuan sebanyak 297.537 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan mencapai 49,7% dari total populasi Kota Jambi. Besarnya penduduk perempuan berarti bahwa besar pula aspirasi kebutuhan perempuan yang perlu diakomodir. Asumsi bahwa perempuan dapat menjadi representasi paling tepat untuk menyuarakan dan mewakili perempuan dalam kontestasi politik mengharuskan perempuan mewakili kaumnya.

Kota Jambi menjadi salah satu penyelenggara Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019. Terdapat 16 Partai yang berkontesasi memperebutkan kursi legislatif pada lima Daerah Pemilihan (Dapil). Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang saat itu didukung dengan popularitas Calon Presiden dari oposisi, Prabowo Subianto, menguasai perolehan suara disusul dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga didukung dengan pencalonan ulang presiden inkumben saat itu Joko Widodo. Partai besar lainnya yang juga mendapatkan suara dominan adalah Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Berikut rekapitulasi perolehan suara 16 Parpol pada Pileg 2019 di Kota Jambi.

Perolehan suara tersebut merupakan akumulasi dari seluruh calon legislatif di lima Daerah

Pemilihan (Dapil). Dapil 1 memilih enam (6) calon anggota, diikuti dengan dapil 2 dengan jumlah tujuh (7) calon anggota dan dapil 3 dengan delapan (8) calon anggota. Selanjutnya, dapil 4 dan 5 memilih sejumlah 12 calon anggota legislatif. Secara keseluruhan, terdapat total 45 kursi anggota legislatif yang diperebutkan pada Pileg 2019 tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa semakin besar jumlah kursi yang diperebutkan, maka semakin besar pula jumlah peserta yang mendaftar pada dapil tersebut dengan asumsi bahwa hal tersebut memperbesar peluang keterpilihan. Secara umum, rasio keterpilihan seluruh dapil sebanyak 6,3%, dapil 2 dan dapil 3 berada sedikit dibawah dapil 4 dan dapil 5. Artinya pilihan caleg untuk berkontestasi pada dapil dengan jumlah kursi besar tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan keterpilihan.

Selanjutnya, penulis melakukan rekapitulasi perolehan suara pada setiap calon yang terpilih di masing-masing Dapil. Dari total 97.419 suara sah untuk 45 caleg terpilih, caleg perempuan mendapatkan total 17.897 suara, atau sekitar 18% dari keseluruhan suara. Sedangkan dari jumlah suara partai sebanyak 311.405 suara, caleg perempuan mendapatkan 66.331 suara atau sekitar 21,3 % suara.

#### Dimensi Wakil

Dimensi ini melihat keterwakilan dari aspek wakil rakyat perempuan yaitu calon legislatif itu sendiri. Dimensi Wakil mengarahkan kepada yang dipilih oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Wakil menunjukkan pada keterwakilan merupakan pemberian dan yang mempunyai kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Dalam memilih seorang wakil, masyarakat harus mampu memilih wakil yang representif. Salah satu indikator memilih wakil diantaranya tingkat Pendidikan, pemahaman wakil terhadap politik dan pihak yang dipilih dalam pemilu.

#### Pemahaman Politik

Pemahaman politik dimaknai sebagai pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman seseorang atau kelompok tentang konsep-konsep, struktur, proses, dan dinamika yang terkait dengan politik. Pemahaman politik dianggap terpenuhi jika telah terjadi kesadaran wakil rakyat akan konsep perwakilan dalam demokrasi dan hubungannya dengan pengetahuan masyarakat tentang fungsi wakil rakyat (legislatif).

Kesadaran Caleg Kota Jambi terhadap konsep perwakilan dalam demokrasi bervariasi. Hal ini terlihat dari jawaban narasumber yang telah penulis wawancarai. Sebagian besar dari mereka mengetahui bahwa fungsi mereka adalah sebagai perwakilan masyarakat yang bertujuan untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pemilih atau konstituen mereka. Meskipun mereka menyadari bahwa ada pula masyarakat yang menganggap bahwa wakil legislatif juga bertugas memberikan pelayanan masyarakat sama seperti birokrasi pada eksekutif.

Pengetahuan politik masyarakat dianggap penting, terutama dalam membedakan fungsi legislatif dan badan pemerintahan lainnya. Pemilihan umum serentak diyakini menjadi sarana tepat untuk menanamkan pendidikan politik tentang jabatan politik yang dipilih melalui proses pemilu. Selanjutnya, pada dimensi wakil juga tergambar pengetahuan caleg akan fungsi wakil rakyat. Partai politik menyadari betul bahwa belum tentu setiap caleg memahami proses politik dimana anggota legislatif berperan didalamnya. Sehingga, partai politik rutin melakukan pendidikan politik kepada

kandidat caleg yang akan mendaftar melalui partai mereka.

Hal ini disampaikan oleh RR. Nully Kurniasih K, S.E, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat (PD) Kota Jambi yang juga sekaligus anggota DPRD Kota Jambi tahun 2019 dari Fraksi Partai Demokrat yang mencalonkan diri dengan nomor urut 1. Menurutnya;

*“Partai merupakan sarana pendidikan politik, terutama untuk kader partai yang akan menjadi penerus masa depan partai politik. Namun, PD tidak menutup kemungkinan untuk menerima orang baru yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai mereka”*

Hal ini akan mendapatkan perhatian khusus dengan diberikan pembekalan proses politik di tanah air dengan konsep demokrasi. Sedangkan dari segi masyarakat sendiri, menurut penuturan Komisioner KPU Kota Jambi, Muhammad Ibnu Arafah dalam wawancara yang penulis lakukan, masyarakat kota jambi telah diberikan pendidikan politik oleh pemerintah melalui KPU tentang apa tugas dan kedudukan legislatif dalam proses demokrasi di pemerintahan.

*“KPU rutin memberikan sosialisasi tentang siapa saja yang akan dipilih masyarakat dalam pemilu, terutama untuk legislatif yang pasti akan sangat banyak pilihan.”*

Faktor yang menentukan masyarakat memilih wakil dalam pemilu legislatif sangat beragam. Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat utamanya menjadi penentu mengapa caleg tertentu menjadi pilihan mereka. Namun faktor keterkenalan caleg menjadi salah satu penyebab utama masyarakat memilih mereka, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Maulana, tokoh dan calon walikota dari PAN yang menyatakan bahwa;

*“Pilihan PAN untuk merekomendasikan caleg perempuan adalah karena aspek ketokohan caleg tersebut ditengah masyarakat”*

Hal ini tidak mengherankan jika melihat tokoh-tokoh politik dari kalangan artis dan pemengaruh lahir dari partai PAN. Setiap orang berhak untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik, tidak menutup kemungkinan pula bagi kalangan selebriti. Modal ketokohan dan nama baik tokoh menjadi aspek besar yang mendukung keterpilihan mereka, sehingga PAN menganggap pekerjaan partai akan lebih fokus pada membangun citra mereka sebagai politisi ulung yang sesuai dengan selera masyarakat.

Pihak yang dipilih dalam Pemilu

Pada aspek ini, Pitkin menekankan pada aspek caleg dan posisi mereka dalam proses politik. Hal ini terdiri dari aspek motivasi untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di legislatif dan bagaimana *potitioning* mereka dalam perwakilan politik. Motivasi caleg dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dapat dikatakan normatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Hal ini mempertegas bagaimana mereka kemudian memosisikan diri mereka ditengah masyarakat.

Tema rakyat masih menjadi pilihan caleg untuk membranding diri mereka, Bawaslu menganggap ini masih terkait dengan jargon kampanye Pilpres pada saat itu, dimana Joko Widodo erat dianggap sebagai presiden rakyat dan terpilih kembali pada tahun 2019. Hal ini juga mendukung pencapaian keterpilihan caleg dari partai PDI P sebanyak 6 Caleg yang menduduki caleg terbanyak ke-

2 setelah Partai Gerinda yang memposisikan diri tegas sebagai oposisi. Nama besar calon presiden dari Gerindra yaitu Prabowo Subianto, masih menjadi faktor kuat ketokohan dari partai Gerindra.

Selanjutnya, dari aspek keanggotaan, proses dan tantangan kaderisasi caleg dalam partai politik pada pileg 2019 lalu ditanggapi berbeda dari partai tersebut. PAN, meyakini bahwa siapa saja berhak untuk mencalonkan diri dan tidak mesti harus merupakan anggota partai dan tidak harus merupakan orang yang telah lama mengikuti proses kaderisasi. Selama caleg tersebut mau bergabung menjadi anggota dan mengikuti pembekalan maka tidak ada halangan bagi calon untuk mendaftar dari PAN.

Sedangkan Partai Demokrat, selain membuka kesempatan bagi siapa saja untuk bergabung, namun tetap memprioritaskan calon yang merupakan kader partai, RR. Nully sendiri yang dicalonkan dengan nomor urut 1, merupakan kader partai Demokrat yang juga pengurus di berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Kaderisasi, menurutnya merupakan bagian penting dari peran dan fungsi partai politik. Tidak mengherankan bahwa terdapat dua (2) orang dari total delapan (8) caleg perempuan terpilih merupakan kader partai demokrat yang dikontestasikan dengan nomor urut 1. Prioritas penomoran kader menjadi penting dalam hal ini mengingat asumsi masyarakat akan nomor masih sangat kental.

#### Dimensi Diwakili

Dimensi Keterwakilan deskriptif merujuk kepada pemilih yang memiliki hak pilih sebagai simbol masyarakat secara keseluruhan. Wakil bisa berdiri demi orang yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain. Sehingga yang diwakili memiliki peran penting untuk terpilihnya pihak yang diwakili di legislatif. Dalam hal ini indikator diwakili yaitu kepercayaan terhadap wakil dan masyarakat pemilik hak suara.

#### Kepercayaan terhadap wakil

Kepercayaan terhadap wakil tumbuh berdasarkan pada adanya kriteria yang harus dimiliki oleh wakil rakyat sehingga memunculkan kecenderungan memilih calon wakil rakyat, terlepas itu dari partai tertentu atau tidak spesifik dari suatu partai. Kecenderungan memilih juga dapat disebabkan dari golongan atau suku tertentu dan keanggotaan dalam organisasi masyarakat tertentu.

Seorang wakil rakyat perempuan di Indonesia idealnya memiliki kriteria sebagai penyerap aspirasi masyarakat yang baik. Riska Suciati, calon legislatif dari PAN menegaskan bahwa caleg perempuan harus memiliki integritas dan kejujuran sebagai fondasi utama dan tidak boleh tergoyahkan. Kepercayaan publik adalah modal utama, sehingga seorang wakil rakyat harus mampu menjaga amanah dan bertindak sesuai dengan sumpah jabatan.

*“Meskipun caleg perempuan ini belum banyak dikenal masyarakat, tapi dengan modal kejujuran dan menjaga amanah, maka masyarakat akan melihat sendiri”*

Wakil rakyat juga harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang luas tentang isu-isu terkini, terutama yang menyangkut perempuan dan anak-anak. Caleg perempuan juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang akan memungkinkannya menyampaikan aspirasi konstituen secara efektif dan membangun relasi yang kuat dengan berbagai pihak. Terakhir, menurutnya caleg perempuan harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan Kota Jambi dan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah hal mutlak.

Oleh karena itu, Maulana menyatakan bahwa

*“PAN merasa perlu untuk mendorong kader perempuan menjadi bagian dari masyarakat dengan adanya organisasi sayap partai PAN untuk perempuan yaitu Perempuan Amanat Nasional (PUAN). Kehadiran PUAN ditengah masyarakat bertujuan untuk menyoroti isu-isu sosial, ekonomi dan pendidikan terutama dari kalangan perempuan dan anak yang selama ini seperti termarginalkan dari isu pembangunan arus utama”*

### **Strategi Meningkatkan Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif di Kota Jambi**

Posisi perempuan diruang publik masih menjadi pembahasan menarik baik dari kalangan feminis maupun kajian ilmiah terkait konteks manajemen kinerja, terlepas apapun peran mereka dalam pekerjaan. Pekerjaan, terutama dibidang politik, terkesan menjadi ranah bagi kaum pria, adu kekuatan argument, waktu Panjang yang tidak menentu untuk lobi politik dan risiko pekerjaan yang besar menjadikan politik semakin maskulin. Disisi lain, perempuan yang selama ini menjalankan fungsi dan perang mengurus rumah tangga, masih disangsikan untuk dapat berperan sebaik dan sebanyak pria dalam pekerjaan. Terlebih jika pekerjaan tersebut di bidang politik, yang dianggap merupakan pekerjaan maskulin, lebih dari pekerjaan kantoran lainnya.

Anggapan demikian tidak dapat dilepaskan dari budaya dan norma sosial yang hidup di masyarakat saat ini, terutama di Jambi. Anggapan bahwa pekerjaan di bidang politik adalah pekerjaan maskulin merupakan sebuah stereotip yang telah mengakar dalam masyarakat selama berabad-abad. Pandangan ini seringkali dikaitkan dengan asumsi bahwa politik adalah ranah kekuasaan dan dominasi yang lebih cocok untuk laki-laki.

Kota Jambi sendiri merupakan sebuah kota perkembangan dari pesisir Sungai Batanghari dibawah bendera Islam. Selama ratusan tahun dalam pengaruh agama Islam dan budaya melayu, masyarakat Kota Jambi masih banyak mempercayai bahwa peran perempuan berada pada peran domestic rumah tangga. Berikut kutipan wawancara dengan anggota Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi yang juga merupakan anggota DPRD Kota Jambi.

*“Jambi ini dulunya sebagai tempat beradanya Kerajaan Melayu sampai berubah menjadi Kesultanan Melayu, mulai dari jaman Datuk Paduko Berhalo hingga lah yang saat ini sebagai symbol adat anak dari Sulthan Thaha Saifuddin, nama nya diabadikan menjadi nama Bandara, nama Kampus, nama jalan dan banyak lainnya. Dan memang ya perempuan di masa itu belum ada yang menjadi pemimpin, keturunan – keturunan Sultan terus sampai saat ini di anak laki – laki”*

Anggapan bahwa politik adalah ranah kekuasaan dan dominasi yang lebih cocok untuk laki-laki telah menjadi norma sosial di Kota Jambi selama berabad-abad. Pandangan ini erat kaitannya dengan konstruksi gender di Kesultanan Jambi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin alami selama ratusan tahun dan perempuan sebagai pengikut.

Dewasa ini, dalam bidang politik pun anggapan tersebut masih mengikat. Hal ini dikarenakan pada praktiknya politik membutuhkan sifat-sifat seperti tegas, kompetitif, dan berorientasi pada tujuan, yang sering diasosiasikan dengan maskulinitas. Sejarah panjang kepemimpinan laki-laki dalam berbagai pemerintahan juga sering dijadikan bukti untuk mendukung anggapan ini.

Pandangan pada akhirnya banyak dikritik karena mengabaikan kompleksitas peran gender dan kemampuan individu. Perkembangan zaman dan studi-studi terbaru menunjukkan bahwa kemampuan kepemimpinan tidak terbatas pada gender tertentu. Perempuan telah menunjukkan kapasitas yang sama dalam memimpin dan mengambil keputusan yang sulit. Oleh karena itu, penting untuk menguji kembali anggapan-anggapan yang telah mapan dan membuka ruang bagi partisipasi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan dalam dunia politik.

Seahrusnya, anggapan ini tidak lagi relevan dengan konteks masyarakat modern yang semakin menjunjung tinggi kesetaraan gender. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak perempuan yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia politik, baik sebagai pemimpin negara, anggota parlemen, maupun aktivis. Kemampuan kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dan kecerdasan emosional adalah kualitas yang dibutuhkan dalam politik, dan kualitas-kualitas ini tidaklah terbatas pada gender tertentu. Oleh karena itu, pandangan yang membatasi partisipasi perempuan dalam politik semata-mata karena gender adalah pandangan yang diskriminatif dan menghambat kemajuan demokrasi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) Rendahnya keterpilihan caleg perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Jambi disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adanya budaya patriarki, rendahnya kepercayaan terhadap wakil perempuan dibanding dengan wakil laki - laki yang sudah lebih banyak dikenal serta sistem pemilu yang belum memungkinkan pencapaian maksimal 30% afirmasi perempuan; 2) Partai politik menerapkan strategi dengan membuat sayap organisasi perempuan untuk meningkatkan keterpilihan calon legislatif perempuan serta mendapatkan kader yang baik. Hal ini dapat dikatakan cukup efektif karena melalui organisasi sayap perempuan, partai dapat menghasilkan kader yang sesuai dengan ideologi dan visi partai.

Adapun yang menjadi saran penelitian ini yaitu: 1) Partai politik diharapkan dapat meningkatkan fungsi partai sebagai mesin penghasil kader terbaik untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif yang memahami peran dan fungsi wakil rakyat melalui sekolah politik di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Pendidikan politik sejak dini memberikan gambaran bagi remaja putri untuk berkarir di bidang politik, sehingga kesempatan untuk mendapatkan modal sosial akan lebih terbuka bagi perempuan; 2) KPU hendaknya secara berkesinambungan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sejak dini, terkait peran dan fungsi wakil rakyat, untuk menciptakan tuntutan kualitas caleg dari masyarakat termasuk mengangkat isu-isu perempuan dan anak yang tidak secara khusus diakomodir oleh caleg saat ini dan 3) Penulis dimasa yang akan datang dapat fokus pada riset modal sosial perempuan dalam kontestasi pemilu legislatif di Kabupaten dan Kota di Indonesia, terutama dimana budaya patriarki masih sangat kuat. Selain itu, akan menarik melihat bagaimana representasi perempuan dalam politik di kota / kabupaten dimana terdapat aturan baik dari tuntutan agama maupun budaya yang membatasi perempuan untuk membangun modal sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. 9th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, 2011.
- Cresswell, J.W., V.L. Plano-Clark, M.L. Gutmann, and W.E. Hanson. "Advanced Mixed Methods Research Designs." *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*, 2003.
- Effendi, Amir. *Representasi Politik Perempuan: Sekedar Ada Atau Pemberi Warna*. Edisi 6 Ta. Jakarta: Sosial Demokrasi, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif." Bandung: Alfabeta, 2016.
- Miles, Mattwe B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edit. California: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." In *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017.
- Muhammad Hananda Firdausy. "Konstruksi Sosial Gender Di Masyarakat." *Gender Dan Keadilan Sosial*, 2022.
- Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept Of Representation. The Concept of Representation*. 1st ed. California: University of California Press, 1967. <https://doi.org/10.1525/9780520340503>.
- Abdurrahman, Ahmad Zein. "Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Karang Sari." *University Diponegoro Institutionsl Repository*, 2023.
- Adi, Jusri, Fitriani Sari Handayani Razak, and Hendri Kurniawan. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan Di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba." *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 2022.
- Anastasia, Ayu, Edriana Noerdin, Sekar Pireno KS, and Sita Aripurnami. *Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan*. 1st ed. Jakarta: Women Research Institute, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/45080-ID-panduan-pelatihan-kepemimpinan-perempuan.pdf>.
- Ardiansa, Dirga. "Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik Di Indonesia." *Jurnal Politik*, 2017. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>.
- Bengtson, Andreas. "Affirmative Action in the Political Domain." *Political Studies* 72, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1177/00323217221095379>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. 9th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, 2011.
- Cresswell, J.W., V.L. Plano-Clark, M.L. Gutmann, and W.E. Hanson. "Advanced Mixed Methods Research Designs." *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*, 2003.
- Dynes, Adam M., Hans J.G. Hassell, Matthew R. Miles, and Jessica Robinson Preece. "Personality and

- Gendered Selection Processes in the Political Pipeline.” *Politics and Gender* 17, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000461>.
- Effendi, Amir. *Representasi Politik Perempuan: Sekedar Ada Atau Pemberi Warna*. Edisi 6 Ta. Jakarta: Sosial Demokrasi, 2009.
- Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma, and Dyah Mutiarin. “Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi Pada Inovasi Pelayanan ‘Kumis MbahTejo’ Di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta).” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 1, no. 2 (2019): 156. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753>.
- Fakih, Mansour. “Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam : Tinjauan Dari Analisis Gender.” *Tarjih*, 2008.
- Fauzi, Eka Perwitasari. “Konstruksi Sosial Soft Masculinity Dalam Budaya Pop Korea.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2021. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3687>.
- Firmansyah, Joni, Leni Nurul Kariyani, and Gita Rizkia. “Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.” *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i1.16181>.
- Hakiki, Gaib, and Asnita Ulfa. *Perempuan Dan Laki-Laki Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Hari, K. Harishma, and P. A. Khamarunnisa. “The Politics of Representing Dalit Women: A Study of the Newspaper Khabar Lahariya and the Documentary Writing with Fire.” *Journal of International Women’s Studies* 24, no. 7 (2022).
- Hasanah, Ulfatun, and Najahan Musyafak. “GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 2018. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>.
- Hevriansyah, A. “Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif.” *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): h 67-85. <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>.
- Hoyenga, Katharine Blick, and Kermit T. Hoyenga. “Gender and Energy Balance: Sex Differences in Adaptations for Feast and Famine.” *Physiology and Behavior*, 1982. [https://doi.org/10.1016/0031-9384\(82\)90153-6](https://doi.org/10.1016/0031-9384(82)90153-6).
- Htun, Mala N. “Women in Political Power in Latin America.” *Women in Parliament: Beyond the Numbers*, 2002.
- Ismiati. “Pengaruh Stereotype Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan.” *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 7, no. 1 (2018).
- Jakešević, Ružica, and Đana Luša. “Breaking the Glass Ceiling: The Role of the UN and the EU in Promoting Women in Politics.” *Politicka Misao* 58, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20901/PM.58.2.02>.
- Lee, Don S., and Soonae Park. “Democratization and Women’s Representation in Presidential

- Cabinets: Evidence from East and Southeast Asia.” *Asian Journal of Political Science* 26, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1476257>.
- Mansbridge, Jane. “Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent ‘Yes.’” *Journal of Politics* 61, no. 3 (1999). <https://doi.org/10.2307/2647821>.
- Mattes, Astrid. “Liberal Democratic Representation and the Politicization of Religion.” *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14220/23642807-00402010>.
- Miles, Mattwe B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edit. California: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” In *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017.
- Muhammad Hananda Firdausy. “Konstruksi Sosial Gender Di Masyarakat.” *Gender Dan Keadilan Sosial*, 2022.
- Murniati, Cecilia Titiek, Christine A Ogren, and Scott F McNabb. “Career Advancement of Women Senior Academic Administrators in Indonesia: Supports and Challenges.” *Educational Policy and Leadership Studies, Center for Asian and Pacific Studies*, 2012.
- Nazneen, Sohela. “Gender and Intersecting Inequalities in Local Government in South Asia.” *World Social Science Report 2016*, 2016.
- Ninla Elmawati Falabiba. “Konsep Dasar Gender.” *Kesetaraan Gender & Posisinya*, 2019.
- Nurchahyo, Abraham. “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen.” *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 2016. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>.
- Nurdin, Nurliah, and Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 7. Purbalingga: CV. Sketsa Media, 2022. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=TxZcVnUAAAAJ&citation\\_for\\_view=TxZcVnUAAAAJ:e5wmG9Sq2KIC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=TxZcVnUAAAAJ&citation_for_view=TxZcVnUAAAAJ:e5wmG9Sq2KIC).
- Pitkin, Hanna Fenichel. *THE CONCEPT OF REPRESENTATION. The Concept of Representation*. 1st ed. California: University of California Press, 1967. <https://doi.org/10.1525/9780520340503>.
- Probosiwi, Ratih. “Gender Dan Pembangunan.” *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 2015.
- Rahmanto, Fajar, Eko Priyo Purnomo, Aulia Nur Kasiwi, and Lubna Salsabila. “Women’s Representation through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 6, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.22666>.
- Raqim, Ukhti. “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga.” Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Riswani, and Hermansyah. “Streotipe Gender Dan Pilihan Karier Di Kalangan Siswi Madrasah Aliyah (Ma) Diniyah Puteri Pekanbaru Riau.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 14, no. 2

- (December 1, 2015): 225–53. <https://doi.org/10.24014/MARWAH.V14I2.2628>.
- Ropik, Ainur, and Wijaya Wijaya. “Kesadaran Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan: Studi Pada Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2019. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4664>.
- Sabon, Victoria Lelu, Mochamad Tommy Putra Perdana, Permata Citra Stella Koropit, and Wajong Christian David Pierre. “Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia Pada ASEAN Economic Community.” *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 8, no. 2 (August 9, 2018). <https://doi.org/10.15408/ESS.V8I2.5928>.
- Santi, Endang Tri. “Representasi Citra Politisi Perempuan Di Parlemen (Analisis Framing Dalam Pemberitaan Voaindonesia.Com Dan Mediaindonesia.Com).” *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 2020. <https://doi.org/10.33592/dk.v7i2.357>.
- Shim, Jaemin. “Gender and Politics in Northeast Asia: Legislative Patterns and Substantive Representation in Korea and Taiwan.” *Journal of Women, Politics and Policy* 42, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.1080/1554477X.2021.1888677>.
- Soeseno, Nuri. “Female Politicians in Political Parties of 2014 Election: Descriptive Representation vs. Substantive Representation.” *Indonesian Feminist Journal*, n.d.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. “Memahami Penelitian Kualitatif.” *Bandung: Alfabeta*, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Thomas, D. A. Lloyd, and Hanna Fenichel Pitkin. “The Concept of Representation.” *The Philosophical Quarterly*, 1969. <https://doi.org/10.2307/2217708>.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang [Women’s Representation in the 2019 Parliament Election: Challenges and Opportunities].” *Kajian*, 2020.
- Velikaya, Nataliya, and Elena Berezkina. “How Do Women Are Represented in the European Legislative Assemblies: Comparative Analysis of the Left and Populist Political Parties’ Practices.” *Science. Culture. Society* 28, no. 2S (2022). <https://doi.org/10.19181/nko.2022.28.2s.1>.
- Wightman, Clare. *More than Munitions: Women, Work and the Engineering Industries, 1900-1950. More than Munitions: Women, Work and the Engineering Industries, 1900-1950*, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315838304>.
- Yuniati, Yenni, and Dedeh Fardiah. “Citra Caleg Perempuan Dalam Framing Media Online.” *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2017. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2690>.